

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesenjangan implementasi yang terjadi pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian jenis kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, Guru Pendamping Khusus SD di Kota Salatiga, dan ketua Pokja Inklusif Kota Salatiga. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Tahap dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Model Implementasi Edward III dengan hasil yang melihat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD N Blotongan 3 Kota Salatiga dinilai masih belum optimal. Komunikasi merupakan aspek yang membutuhkan banyak perbaikan, sedangkan aspek yang paling baik adalah sumber daya.

**KATA KUNCI:** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, *Implementation gap*, Pendidikan Inklusif

## **ABSTRACT**

This study aims to describe the implementation gap that occurs in the implementation of inclusive education policy in Indonesia. This type of qualitative research using case study approach. Subjects in this study were principals, Shadow Teachers of Elementary School's in Salatiga City, and chairman of the Salatiga City Inclusive Working Group. Methods of collecting data through interviews, observation, and document studies. Stages in data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions.

The collected data is then analyzed using the Edward III Implementation Model with results that look at communication factors, resources, dispositions, and bureaucratic structures. The results showed that the implementation of the Inclusive Education Policy at SD N Blotongan 3 Kota Salatiga is considered not optimal. Communication is an aspect that requires a lot of improvement, while the best aspect is the resources.

**KEYWORDS:** Public Policy, Implementation Policy, Implementation Gap,  
Inclusive Education